

**ANALISIS AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN DANA KAMPUNG**  
(Studi Kasus Kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya)

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Akademik  
Guna Mencapai Gelar Sarjana S.AP  
Pada Program Studi Administrasi Publik*



Oleh :

**APIRINDA WANIMBO  
NIM. 2016 11 008**

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA  
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA  
UNIVERSITAS AMAL ILMIAH (UNAIM)YAPIS WAMENA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
2022**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA KAMPUNG

(Studi Kasus Kampung Numbo Distrik Tiom Ollo Kabupaten Lanny Jaya)

Identitas Penulis,

NAMA : **APIRINDA WANIMBO**

NIM : **2016 11 008**

PROGRAM STUDI : **Administrasi Publik**

Telah diperiksa dan disetujui

Pada Tanggal : **Rabu, 14 September 2022**

Pembimbing I

Pembimbing II

**SITI KHIKMATUL RIZQI S,IP.,M.Si**  
**NIDN. 1201037702**

**Dra. TELLY NANCY SILOOY M,Si**  
**NIDN. 1407086701**

Mengetahui :

Ketua Program Studi,

**Hj. IRMAYANI MISRAH, S.Sos.,M.AP**  
**NIDN. 1409108402**

## HALAMAN PENGESAHAN

### ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA KAMPUNG

(Studi Kasus Kampung Numbo Distrik Tiom Ollo Kabupaten Lanny Jaya)

Telah Dipertahankan Skripsi ini Di Depan Panitia Ujian Skripsi  
Pada 01 Bulan Oktober Tahun 2022

#### PANITIA UJIAN SKRIPSI

Ketua,

Sekretaris,

**SITI KHIKMATUL RIZQI S.IP.,M.Si**  
NIDN. 1201037702

**Dra. TELLY NANCY SILOOY M.Si**  
NIDN. 1407086701

Anggota,

Anggota,

**BAMBANG SUPENO DOMI, S.Sos., M.Si**  
NIDN. 1204076701

**TUKLIAN S.Sos., M.Si**  
NIDN. 142701276601

**Mengetahui :**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

**Dra. TELLY NANCY SILOOY M.Si**  
NIDN. 1407086701

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, hidayah, petunjuk, perlindungan serta pertolongannya sehingga penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Di dalam proses penyusunan penulisan skripsi ini, penulisan banyak menerima bimbingan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini secara kusus penulisan dengan tulus hati menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. H .Rudihartono Ismail, M.Pd selaku Rektor Unuversitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Yang telah memimpin saya selama perkuliaan sampai dengan skripsi ini.
2. Ibu Dra. Telly Nancy Silooy.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, yang Selalu memberikan motifasi dan mendorong dalam penyusunan skripsi
3. Ibu Irmayani Misrah,S.Sos.,M.AP Selaku Ketua Program studi Administrasi Publik
4. Bapak Soltan Takdir ST, M,Si dan Bapak Irsan Yelipele S.Sos. M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, Yang telah Membina, mendidik, dan Mengabdikan Ilmu Kepada saya selama perkuliaan sampai dengan skripsi.
5. Bapak BamBang S. Domi S.Sos. M.Si Selaku Dosen Wali yang telah mendidik , membina dan mengabdikan ilmu dalam perkuliaan sampi penyusunan skripsi
6. Bapak /Ibu Dosen Lingkungan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Khususnya Pada Program Studi Adminitrasi Pablik yang telah mendidik, membina dan mengabdikan Ilmu kepada penulisan, serta seluruh staf yang telah membantu penulis selam menekuni studi.
7. Oerang tua tercinta Ayah Penias Wanimbo dan Ibu Nesina Wenda Yang telah Membesarkan Penulis serta Kakakku Epi Wanimbo,SE. Kori Wanimbo Serta adikku Maikel Wanimbo. S.IP yang telah Memberikan Doa dan Restu Sehingga Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan tepat waktu

8. Yang tersayang Suamiku Alus Tabo ST, serta Ketiga Putra/Putri Astela Tabo, Ben Alfino Tabo, J.George Oktovian Tabo yang telah sabar menanti dan memberikan motivasi kepada penulis agar menyelesaikan perkuliahan ini.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Adminitrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena atas kebersamaanya selama penulisan duduk di bangku perkuliaan.
10. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulisan sebutkan satu persatu,yang dengan rela membantu penulisan baik selama menekuni studi maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari dalam penulisan ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan di mana masih jauh dari suatu kerja ilmiah yang baik dan sempurna. Oleh karena itu atas segala kekurangannya, maka penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan penulisan ini.

Semoga semua amal bakti diberikan kepada penulisan kiranya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga skripsi ini juga bermanfaat di hati pembaca.

Wamena 15 agustus 2022

P e n u l i s .

**APIRINDA WANIMBO**

**NIM: 201611008**

## ABSTRAKSI

**Apirinda Wanimbo Nim: 201611008** “*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung (Studi Kasus Kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jay)*”

**(Pembimbing I :Soltan Takdir ST dan Pembimbing II: Irsan Yelipele)**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya penelitian ini terdiri dari 1 (satu) variabel ,yaitu Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung (Studi Kasus Kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya ) dengan indikator- indikator yang di ukur yaitu : perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. sampel dalam penelitian ini sebanyak 78 kepala keluarga sebagai responden.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka, observasi, dan kuesioner / angket.

Kesimpulannya dari penelitian ini diperoleh bahwa hasil baik dengan hasil rata-rata 239,9. berdasarkan penelitian yang di peroleh dari penyebaran daftar pertanyaan kepada masyarakat Kampung Numbo Distrik Tiom Kabupaten Lanny Jaya dengan beberapa indikator akuntabilitas perencanaan dengan predikat 246, akuntabilitas pelaksanaan dengan Predikat 240, akuntabilitas pengawasan dengan predikat 229,3: dan akuntabilitas pertanggungjawaban dengan predikat 443,6.

**Kata Kunci:** *Akuntabilitas, Pengelolaan , Dana Kampung*

## DAFTAR ISI

*Halaman*

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRASKSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Batasan masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Rumusan masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Tujuan dan kegunaan penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b>	
<b>A. Kajian Teori.....</b>	<b>7</b>
<b>1. Pengertian Akuntabilitas.....</b>	<b>7</b>
<b>2. Otonomi Kampung Berdasarkan Undang-Undang No 6             Tahun 2014 Tentang Kampung.....</b>	<b>10</b>
<b>3. Indikator Akuntabilitas.....</b>	<b>12</b>
<b>B. Penelitian terdahulu .....</b>	<b>17</b>
<b>C. Definisi operasional .....</b>	<b>18</b>
<b>D. Kerangka konseptual penelitian .....</b>	<b>18</b>
<b>BAB III. METODE DAN TEKNIK PENELITIAN</b>	
<b>A. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>19</b>
<b>B. Jenis Penelitian.....</b>	<b>19</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 hierarki Tingkat Akuntabilitas .....	10
Gambar 2.1 Alur Perencanaan Dana Kampung.....	13
Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian .....	18
Gambar 4.1 Gambar Struktur Organisasi Kampung .....	28
Foto waktu penelitian ke kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya.....	51

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan permasalahan masyarakat, hak dan asal usul, dan hak tradisional yang diakui, di hormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (NKRI). (Sujarweni, 2015: 1). Kampung merupakan sekelompok manusia atau orang yang membentuk sebuah kelompok yang saling berinteraksi sehingga dalam masyarakat tersebut terdapat kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan agar ditaati dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat. Kesepakatan yang sudah ada dalam masyarakat kemudian menjadi pedoman pada setiap warganya, sehingga dapat membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lain.

Masyarakat itu sendiri mempunyai dua sifat yaitu ada yang bersifat terbuka yang biasa menerima perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan menggabungkan berbagai jenis kebudayaan yang sudah ada, dan sebaliknya masyarakat yang mempunyai sifat tertutup cenderung sulit untuk menerima perubahan – perubahan yang ada karena mereka tidak terbiasa melakukan sesuatu yang mereka tidak pahami dan tidak biasa mereka jalankan, biasanya juga terjadi pada masyarakat yang masih tradisional dan tinggal di daerah pedesaan atau pegunungan.

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah. Akuntabilitas kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberi pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Mardiasmo, 2015:

Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Kampung kelembagaan Kampung yaitu organisasi pemerintah Kampung terdiri atas pemerintahan Kampung dan badan permusyawaratan Kampung, dan badan kemasyarakatan Kampung. Badan permusyawaratan Kampung adalah organisasi

yang menyelenggarakan pemerintahan yang anggotanya adalah masyarakat berdasarkan wilayah yang ditetapkan secara demokratis”.

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan social warga agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan aktivitas dan fungsisosialnya. Tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan program Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan pendataan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentas kemiskinan, sedangkan menurut Badan Pusat Statistik tahun 2006 yang menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Pengesahan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Kampung adalah langkah awal bagi Kampung menjalankan kewenangannya dalam UU Kampung juga terdapat Dana Kampung yang bersumber dari APBN. Dana Kampung merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal usul Kampung dan kewenangan lokal berskala Kampung. Alokasi Dana Kampung diharapkan dapat mem beritambahan energi bagi kampung dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Kampung, menuju kampung yang kuat, maju, mandiri dan sejahtera. Dibawah UU No 6 Tahun 2014 tentang kampung , pemerintah juga mengeluarkan PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung yang diterima dari APBN dan langsung diterima oleh Kampung. Menurut kementrian Kampung, dana Kampung tersebut akan diterima sebesar 3% ditahun 2015, meningkat hingga 6% pada tahun 2016, sampai pada tahun 2017 mencapai 10% dan dana Kampung berjumlah 1 miliar.

Peraturan pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 pasal 1 Dana Kampung adalah pemerintahan Kampung sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmatu dalam Sumpeno (2011) melibatkan kemampuan pemerintah Kampung untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang di laksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan Kampung. Pertanggung jawaban dimaksud menyangkut finansial yang terdapat dalam APBKmpng dengan alokasi dana Kampung sebagai komponen didalamnya.

Pengelolaan Alokasi Dana Kampung dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 pasal 4 ayat 7 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukan bagi Kampung yang ditransfer Melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kota/ kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat. Akuntabilitas public adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2015:18).

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait pelaksanaan alokasi dana kampung, kebijakan adalah suatu keputusan dari lembaga yang berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Kebijakan yang mengaturlokasi dana kampung terdapat dalam UU No6 Tahun 2014 dan PP No 60 tahun 2014 yang menyatakan bahwa dana Kampung akan meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Alokasi Dana Kampung merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk Kampung, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterimakan kabupaten. Dana Kampung merupakan dana yang cukup signifikan bagi Kampung untuk menunjang program Kampung. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat pemerintah daerah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Kampung atau Pemerintah Distrik adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan dana yang berasal dari Alokasi Dana Kampung.

Kabupaten Lanny Jaya adalah salah satu kabupaten di provinsi Papua, Indonesia. Menurut legenda bahwa Numbo sudah ada sejak Tahun 1995 Numbo masih dalam bentuk Pemerintahan Kelurahan Bokon. Sejak tahun 1969 berlakulah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pemerintahan Kampung, berakhirnya Pemerintahan Kelurahan Bokon, Numbo dipecah atau dibagi menjadi 4 Kampung yaitu Kampung Giari, Kampung Kumuluk, Kampung Bogomanaom, Kampung Wayulome. Distrik Tiom Olo di wilayah Selatan Kabupaten Lanny Jaya, sebelah barat berbatasan dengan Distrik Tiom,

disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tolikara( Prov. Papua). Luas wilayah Distrik Tiom Olo sebesar 3.688.2 Km. Distrik ini terletak lebih kurang 368.801.50Ha. Dengan waktu tempuh lebih kurang dua jam menggunakan jalan kaki, dan 30 menit melewati kendaraan roda dua.

Akuntabilitas pengelolaan alokasi Dana Kampung diharapkan dapat membuat Kampung menjadi Kampung yang mandiri dan sejahtera, untuk itu dana Kampung seharusnya dapat dilaksanakan oleh aparatur Kampung bersama masyarakat dengan baik dan, Keterbukaan antar perangkat Kampung dengan hasil masyarakat kampung tetapi selama ini dipergunakan dana kampung tidak sesuai, pengamatan awal dilakukan oleh penulis pada tanggal 20 November 2020 masyarakat mengenai kebutuhan dan kepentingan dana Kampung sangat kurang dan menyebabkan kesejahteraan Kampung sangat jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat.

Berikut ini tabel Dana Kampung pada satu Kampung di Distrik Tiom Olo:

**Table 1.1**  
**Alokasi Dana Kampung Numbo**  
**Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny jaya**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Alokasi Dana Kampung</b>
<b>1</b>	<b>2018</b>	<b>250.285.412,00</b>
<b>2</b>	<b>2019</b>	<b>259.960.412,00</b>
<b>3</b>	<b>2020</b>	<b>375.368.981,00</b>

**Sumber Data : Kampung Numbo Tahun 2020**

Berdasarkan dari table 1.1 adalah besar dana Kampung pada Kampung Numbo Berdasarkan Tabel 1.1 adalah jumlah kesejahteraan masyarakat setiap tahunnya terus menurun Karena Kampung tersebut belum Nampak sejahteraan masyarakatnya, terlihat bahwa tidak banyak masyarakat mengetahui anggaran alokasi dana Kampung disetiap tahun dikarenakan kendala pemahaman masyarakat yang kurang terhadap penyaluran pendapatan dana yang diberikan pemerintah tersebut. Walaupun informasi yang diberikan pemerintah kampung

berupa papan pemberitahuan di setiap Kampung itu sudah ada tetapi penjelasan dari pemerintah Kampung sangat kurang sehingga masyarakat tidak tahu dan tidak paham atas penyaluran dana yang dilakukan pemerintah kampung tersebut maka, pemerintahan kampung Numbo dapat dilakukan program air bersih dalam hal ini membangun bak air minum, dan memasang jaringan pipa ke pemukiman masyarakat kampung Numbo.

Pengalokasian Dana Kampung tersebut diperlukan Badan Permusyawaratan Kampung (BPKmpng) sebagai badan pengawas agar dana tersebut dapat disalurkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kampung adalah salah satu Kampung yang mendapatkan Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung dari pemerintah pusat yang akan digunakan sebagai pembangunan, sesuai peraturan pemerintah Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 penyaluran Dana kampung ada 3 tahap, tahap yang ke I pada bulan April yang mana dana tersebut cair sebesar 40%, yang ke II pada bulan Agustus 40% dan yang terakhir pada bulan Oktober sebesar 20%.

Berdasarkan pengamatan awal dilakukan oleh penulis pada tanggal 10 Januari 2021 bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana kampung tersebut masih belum tercapai pada sasaran atau program kampung yang dilihat dari aspek Akuntabilitas Perencanaan adalah program kerja masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana kampung tidak sesuai, Akuntabilitas pelaksanaan adalah program kerja melalui dana kampung tidak mencapai sepenuhnya, Akuntabilitas Pengawasan adalah untuk mencapai tujuan harus melakukan pengarahan dan pengendalian kegiatan dengan baik, Akuntabilitas pertanggungjawaban adalah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB kampung.

Penulis dapat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “**Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung, ( Kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya)**”

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini menggunakan satu variabel yaitu Analisis akuntabilitas pengelolaan dana kampung melalui 4 indikator yaitu :

- a) akuntabilitas perencanaan
- b) Akuntabilitas Pelaksanaan
- c) Akuntabilitas Pertanggungjawaban

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana kampung di kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung, Kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya.

2. Kegunaan penelitian yang dihasilkan dari penelitian ini dapat di bedakan kedalam dua hal yaitu :

##### 1) Kegunaan Teoritis

- a) Hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pengetahuan di bidang adminitrasi pablik, khusus mengenai akuntablitas pengelolaan dana kampung
- b) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah refrensi pada Jurusan Adminitrasi Publik di Universitas Amal Ilmia Yapis Wamena, tentang Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung, Kelembagaan Kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny

##### 2) Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan langsung dengan hasil dari pada penelitian ini serta sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi Pemerintah kampung mengenai Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung, Kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas berasal dari bahasa latin *accomptare* yang berarti mempertanggungjawabkan dan memiliki bentuk dasar *compure* yang artinya menghitung. Akuntabilitas juga dari kata dasar *putare* yang artinya mengadakan perhitungan. Sedangkan akuntabilitas dalam istilah bahasa inggris yaitu *accountability* yang artinya pertanggungjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Berikut pengertian akuntabilitas menurut beberapa ahli.

Selanjutnya peneliti akan memaparkan definisi akuntabilitas menurut Mardiasmo (2004), menerangkan bahwa pengertian akuntabilitas adalah:

“Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.”

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan oleh pimpinan atau lembaga yang memberi wewenang dan akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu organisasi atau perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Berdasarkan beberapa akuntabilitas yang dilihat dari berbagai sudut pandang tersebut, maka akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan good governance. Pemikiran ini bersumber dari pemikiran administrasi publik merupakan isu menuju clean government tatau pemerintahan yang bersih.

Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian merupakan tindakan pada pencapaian tujuan.

Pengertian akuntabilitas menurut Lukito (2014) adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya. Pada prinsipnya, akuntabilitas sektor publik adalah kepada masyarakat, dengan indikator pada hasil produk dan pelayanan publik (*output*) yang dicapai sesuai target (seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan lain-lain).

Melalui pelayanan publik yang berkualitas akan dicapai hasil manfaat (*outcomes*) pembangunan pada perubahan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara umum, dengan tingkatan Akuntabilitas sebagai berikut (Lukito, 2014:3):

#### 1. Akuntabilitas teknis

Akuntabilitas teknis yaitu pertanggungjawaban terhadap *input* dan *output* atau produk yang dihasilkan dari suatu kegiatan pembangunan.

Pada akuntabilitas teknis ini menguraikan rasional dari program, identifikasi kebutuhan dan dampak yang diinginkan yang kemudian didapatkan input. *Input* meliputi sumber daya baik manusia, anggaran, fasilitas dan lainnya yang digunakan untuk menghasilkan output program. *Output* yaitu berbagai produk atau layanan *tangible* (berwujud/nyata) yang dihasilkan oleh suatu program yang berkontribusi kepada pencapaian berbagai tahapan *outcome/* manfaat program.

Unsur-unsur akuntabilitas teknis dari dari penelitian ini adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung. Masalah yang muncul yaitu bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan APBKampung, inputnya adalah pengelolaan APBKampung yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dengan output/produk laporan yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan.

Mekanisme pelaksanaannya dengan menguraikan sasaran yang hendak dicapai (kriteria keberhasilan) dari setiap hasil/manfaat yang

diinginkan. Uraian kriteria keberhasilan merupakan pernyataan dari *outcomes/proses/output* dalam bentuk

pertanyaan seperti; i apa, siapa, kapan, dimana, dan bagaimana hasil diinginkan.

Sistem yang digunakan dalam pengelolaan APBKampung mengacu pada Permendagri No. 113 tahun 2014 dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

## 2. Akuntabilitas strategis

Akuntabilitas strategis adalah tuntutan terhadap pertanggungjawaban *outcomes* atau manfaat, misalnya dalam bentuk kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat

*Outcomes* adalah hasil/ dampak yang ingin dicapai dalam bentuk perubahan pada kualitas hidup individu masyarakat, struktur sosial, atau lingkungan fisik akibat dari pelayanan publik atau intervensi pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pada setiap kerangkakerja program, tujuan program perlu dituliskan dalam pernyataan yang jelas serta bersinergi dengan tujuan kebijakan strategis dari pemerintah yaitu dalam bentuk pernyataan *outcome*. *Outcome* bisa saja merupakan implikasi langsung dari produk suatu

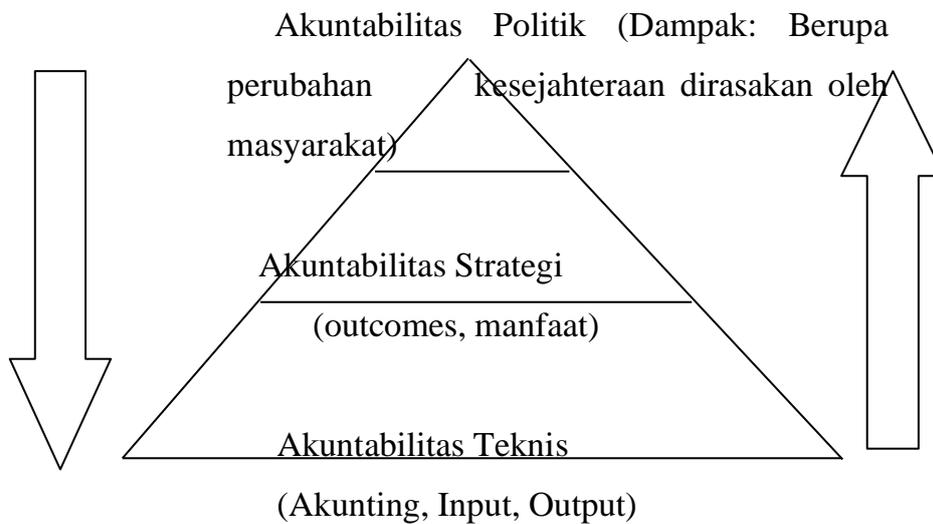
kegiatan atau *output*, namun dapat juga merupakan hasil pada tingkatan eksekusi yang lanjut dari suatu program kegiatan. Langkah yang dilakukan untuk mengukur akuntabilitas strategis yaitu dengan mengukur manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat terkait dengan pengelolaan APBKampung.

## 3. Akuntabilitas Politik

Akuntabilitas Politik adalah pertanggungjawaban terhadap pencapaian dampak atau perubahan sosial/ekonomi/politik yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang diakibatkan dari berbagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah.

Pada akuntabilitas politik ini pertanggungjawabannya dilihat dari visi misi dalam hal ini sebagai janji politik Kepala Kampung terpilih kepada masyarakat.

Gambar I.1 Hierarki Tingkatan Akuntabilitas



Dari gambar I.1 tersebut, terlihat bahwa membangun budaya organisasi publik yang berorientasi kinerja dibutuhkan pada seluruh jenjang pemerintahan. Hal ini juga mengingatkan bahwa dalam suatu organisasi penciptaan etika dan budaya kerja bukan hanya menjadi tugas manajemen puncak semata, tetapi juga merupakan tugas setiap pemimpin di level pelaksanaan manapun. Demikian pula, suatu hasil pembangunan merupakan akumulasi hasil dari kerja berbagai jenjang pemerintahan, dan bahkan merupakan kontribusi hasil dari kegiatan multi-sektor pembangunan.

## **2. Otonomi Kampung Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Kampung**

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Kampung, merupakan UU tentang pengembalian tataran mengenai jati diri Kampung yang dikembalikan lagi kepada asal-usulnya. UU ini juga menggambarkan itikad negara untuk memberikan kemandirian kepada pemerintahan Kampung. Sehingga masyarakat desa disebut sebagai masyarakat yang mengatur dirinya sendiri dan membangun pemerintahan Kampung yang mengatur diri sendiri. Hal yang perlu diperhatikan, desa merupakan tatanan pemerintahan yang kecil di setiap daerah yang telah ada bahkan sebelum Indonesia ini terbentuk sebagai sebuah negara berdaulat. Reformasi ini untuk mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki. Tujuannya

untuk menciptakan pemerintahan kampung yang mampu menyejahterakan rakyat tataran bawah.

Otonomi Kampung merupakan otonomi asli dan utuh yang dimiliki oleh Kampung, dan bukan termasuk pemberian dari pemerintah. Hak pemberian merupakan hak yang diperoleh atas dasar pemberian oleh pemerintahan yang mempunyai strata lebih tinggi. Sedangkan Hak Bawaan merupakan hak yang diperoleh oleh unit pemerintahan akibat dari suatu proses sosial, ekonomi, politik dan budaya, termasuk proses interaksi dengan persekutuan-persekutuan masyarakat hukum lainnya. Oleh sebab itu pemerintah berkewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh Kampung tersebut.

Menurut Undang-undang No 6 tahun 2014 pasal 3 tentang Kampung, terdapat asas- asas yang mengakibatkan Kampung mempunyai hak bawaan :

1. Asas Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul.
2. Asas Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat.
3. Asas Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap nilai yang berlaku di masyarakat Kampung, tetapi tidak mengindahkan nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Disamping itu, tujuan dari adanya otonomi Kampung, pada pasal 4 :

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap Kampung yang sudah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Memberikan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, maupun budaya yang ada di lingkungan masyarakat.
4. Mendorong adanya partisipasi dari masyarakat Kampung untuk mengembangkan potensi yang ada di Kampung yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat.
5. Membentuk pemerintahan Kampung yang profesional secara efektif dan efisien, serta bertanggung jawab.

### **3. Indikator Akuntabilitas**

#### **1. Akuntabilitas Perencanaan (Planing)**

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan tujuan yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menentukan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan menjadi suatu yang penting dalam mencapai tujuan karena merupakan suatu indikator keberhasilan dalam suatu kegiatan, untuk itu diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dan bekerjasama dengan perangkat Kampung.

Sebelum dana Kampung disalurkan, Kampung dan perangkat kampung meminta untuk setiap korong melakukan musyawarah dengan asyarakat, pada musyawarah ini, Kepala kampung dapat menghimpun usulan tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang akan menjadi prioritas dan mejadi kebutuhan masyarakat untuk dijalankan dan dilaksanakan. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut akan dibawa ke Musrenbang untuk dibahas, dimusyawarahkan bersama kepala kampung, perangkat kepala kampung, tokoh masyarakat, niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai dan pemuda kampung yang akan dijadikan RPJM dan RKP kampung. Setelah mereka memeriksa, membahas apa saja kegiatan yang akan dijadikan sebagai prioritas, maka mereka akan menetapkan RPJM dan RKP sebagai hasil musrenbang yang berisi tentang kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan.

Pada musrenbang ini, tingkat partisipasi dan kehadiran masyarakat untuk kampung yang ada di Distrik dapat dikatakan sudah cukup baik dalam menyampaikan aspirasi dan keinginannya.

Wawancara yang dilakukan dengan masyarakat yang ada di Kampung, untuk mengetahui pengetahuan mereka mengenai dana Kampung dan bagaimana cara Kampung dalam menginformasikan kepada masyarakat jika ada kegiatan.

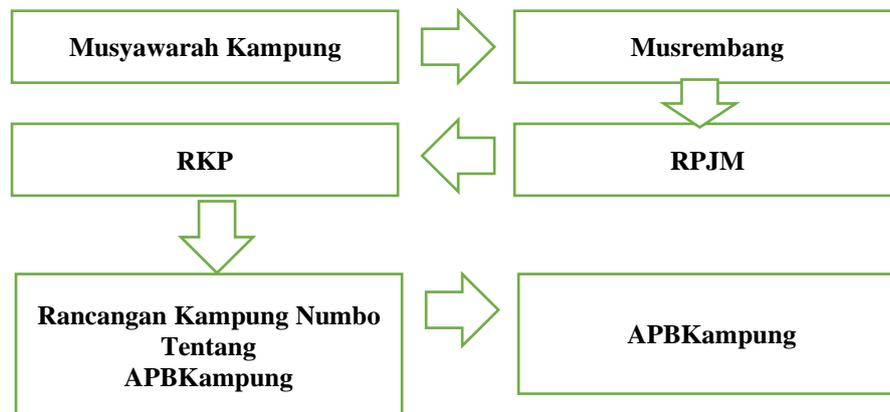
Setelah musrenbang selesai dilaksanakan dan pembetulan RPJM dan RKP akan dibuat Rancangan Peraturan (Raperna) tentang APBKampung berdasarkan RKP kampung yang diperoleh dari hasil musrenbang. Selanjutnya sekretaris nagari menyampaikan Raperna tentang APBKampung kepada kampung untuk memperoleh persetujuan, selanjutnya wali nagari menyampaikan Raperna

tentang APBKampung kepada BAMUS Nagari untuk dibahas agar mendapat persetujuan. Setelah mendapat persetujuan, Kepala kampung mengajukan Raperna tersebut kepada bupati melalui camat untuk dievaluasi dan ditetapkan menjadi peraturan Kampung.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat digambarkan proses perencanaan dana Kampung dalam skema sebagai berikut:

**Gambar 5**

**Alur Perencanaan Dana Kampung**



Sebelum adanya RKP kampung, tim pelaksana kegiatan menyusun format dana Kampung Rancangan Anggaran Biaya, karena perangkat nagari yang tidak handal dalam membuatnya, nagari memilih untuk meminta bantuan pihak ketiga untuk membuat RAB tersebut. Hal ini dibuktikan hasil wawancara berikut: Perencanaan dana kampung ini lebih banyak digunakan untuk pembangunan kampung dibandingkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, karena tujuan utama yang ingin dicapainya yaitu untuk pemerataan pembangunan, hal ini dibuktikan hasil wawancara berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan, bahwa Perencanaan Dana Kampung sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.

## **2. Akuntabilitas Pelaksanaan**

Pelaksanaan merupakan tindakan atas hal yang telah direncanakan dengan matang dan terperinci berdasarkan APBKampung. Pelaksanaan suatu

kegiatan akan berjalan dengan baik jika memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan ditempatkan sesuai dengan kemampuannya, namun sumber daya manusia dari perangkat kampung, masih kurang handal, karena pada Kaur Pembangunan tidak ahli dalam pembuatan gambar sesuai dengan teknis hanya berdasarkan perkiraan saja, terkadang menggunakan jasa dari orang lain dalam pembuatan gambar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Kampung diserahkan kepada TPK, dimana bendahara Kampung akan menyerahkan dana berupa uang sesuai dengan yang telah dianggarkan dan TPK akan membeli bahan dan alat yang dibutuhkan disertai dengan bukti kwitansi.

Jika suatu kegiatan yang telah dianggarkan tidak terlaksana, maka dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara dan menjadi SILPA untuk dana Kampung tahap kedua.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana kampung, diawasi langsung oleh masyarakat dan masyarakat ikut serta sebagai pekerja dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan atau disebut dengan swakelola. Pengawasan tersebut juga dilakukan oleh pihak Kabupaten, berbeda dengan jawaban Plh Wali Nagari Pungguang Kasiak, di Nagari Lubuk Alung pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan dana Kampung yang dilakukan oleh pihak Kabupaten tidak dilakukan dengan semestinya.

Pelaksanaan penggunaan dana Kampung mendapat kritikan dari masyarakat di Kampung, bahwa dari segi perencanaan dengan musyawarah menurut saya hanya formalitas saja, karena yang mengikutinya sebagian besar dilakukan oleh kerabat- kerabatnya saja. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kampung, lebih cenderung mengutamakan orang tertentu. Pelaksanaan pengelolaan dana kampung pasti akan di audit oleh Inspektorat dan BPK setiap tahunnya, Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan, bahwa Pelaksanaan Dana Kampung, masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung, karena dalam pekerjaannya sumber daya manusia dari perangkat nagari masih kurang handal dan berkompeten.

### 3 Akuntabilitas Pengawasan

Fungsi pengawasan pada hakekatnya mengatur apakah kegiatan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam rencana. Sehingga pengawasan membawahkan kita pada fungsi perencanaan. Makin jelas, lengkap serta terkoordinir rencana-rencana makin lengkap pula pengawasan. Dalam prakteknya pembagian fungsi pada mental itu tidak dibedakan secara tajam dan tegas, karena setiap manajer (*top manager, middle manager, dan lower manager*), dalam usaha atau aktifitas-aktifitasnya untuk mencapai tujuan harus melakukan "perencanaan pengorganisaian, peggarahan dan pengendalian" dengan baik

Menurut Jusuf Anwar (2008:128), mengatakan bahwa secara formal, pengawasan hanya bersifat memberikan saran sedangkan tindakan lebih lanjut merupakan wewenang dari orang-orang yang mempunyai fungsi pengendalian. Sehingga disini menjadi sangat jelas jika pengawasan dan pengendalian menempati posisi berbeda, artinya pengawasan yang utama dan pengendalian menyalakan keputusan pengawasan.

Menurut Hasibuan (2002:241), pengawasan ini berkaitan erat sekali dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi karena:

- a. Pengawasan harus terlebih dahulu direncanakan;
- b. Pengawasan baru dapat dilakukan jika ada rencana;
- c. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengawasan dilakukan dengan baik;
- d. Tujuan dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengawasan atau penilaian dilakukan

### 4. Akuntabilitas Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Pertanggungjawaban dana kampung terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBKampung, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap APBKampung, maka pemerintah desa harus membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Hal ini menggambarkan bahwa terjadinya keterlambatan dalam pelaporan penyelenggaraan pemerintah Kampung yang disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran atau bulan Januari, namun faktanya di bulan Desember bendahara kampung masih membuat laporan.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan informasi. Namun nyatanya hal tersebut tidak ada diinformasikan kepada masyarakat.

Dalam setiap transaksi pengeluaran keuangan Kampung, bendahara Kampung wajib menyimpan bukti kwitansi pembelajaan, karena dalam Laporan Pertanggungjawaban harus disertai dengan kwintansi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan, bahwa pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung, dimana terjadi keterlambatan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan dan tidak adanya informasi mengenai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

## B. Penelitian Terdahulu

**Table 2.1**

<b>NO</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Sumber Refrensi</b>
1	<b>Astuty, Fanida, 2013</b>	Akuntabilitas Pemerintah Kampung Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung APBKmpng (Studi pada Alokasi Tahun Anggaran 2011 di Kampung Sareng Distrik geger Kabupaten Madiun)	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengeloaan ADK di Kampung Sareng Kecamatan Geger meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan dasar pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011	Jurnal psikologi Undip.Vol.5.No.1 Tahun 2013
2	Susilo Budi (1007)	Ketimpangan Fisikal Antara Kampung Dan Formulasi Alokasi Dana Kampung (DAK) Di Kabupaten Magelang Tahun 2002 -2007	Terdapat Perbedaan Penerimaan ADK Masing-masing Kampung antara pendistribusian	Tesis UNIVERSITAS Amal Ilmiah Yapis Wamena Tahun 2016
3	Hartono (2008)	Pembangunan Partisipasi Masyarakat Kampung Dalam Program Alokasi Dana Kampung	Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun yang Didiani dari Alokasi Dana	E-Jurnal Manajemen Unud,vol,05 No,2 Thn 2016

### C. Definisi Operasional

Definisi Analisis akuntabilitas pengelolaan dana kampung adalah.

Dalam penelitian ini hanya menggunakan I (satu) variable yaitu analisis akuntabilitas pengelolaan dana kampung. yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi dan pengawasan. Indicator yang digunakan adalah:

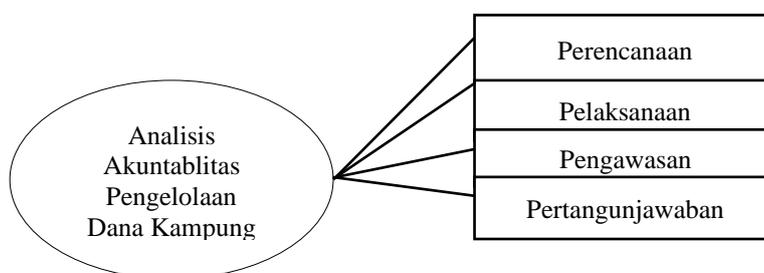
- 1) Akuntabilitas Perencanaan adalah proses penyusunan kegiatan atau yang akan di laksanakan yang sesuai dengan kebutuhan atau masalah di kampung numbo
- 2) Akuntabilitas pelaksanaan adalah proses pengelompokan dan pembagian tugas dan akuntabilitas pengelolaan dana kampung
- 3) Akuntabilitas Pengawasan adalah proses monitoring pelaksanaan dana kampung
- 4) Akuntabilitas Pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban pelaporan kegiatan yang dilakukan

### D. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian kajian teori dan definisi operasional diatas maka kerangka konseptual penelitian ini adalah

Gambar 3.1

Kerangka Konseptual Penelitian



Pada gambar 2.2 dapat dijelaskan bahwa Akuntabilitas pengelolaan dana kampung pertama tama dapat di jelaskan variabel yaitu analisis akuntabilitas pengelolaan dana kampung dapat dijelaskan untuk mengukur kinerja kepala kampung di analisis melalui indicator :

- a) perencanaan,
- b) Pelaksanaan
- c) pengawasan,
- d) pertanggungjawaban.

## BAB III METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

### A. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

#### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kab.

Lanny Jaya

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan selama +1 (Bulan)

### B. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif dan kuantitatif, Menurut **Sugiyono (2011:11)** penelitian deskriptif, adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (Independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

### C. POPULASI DAN SAMPEL

#### 1. Populasi

Menurut **Sugiyono (2009:90)**, Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di terapkan oleh penelitian untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Dari pengertian tersebut jumlah KK masyarakat Kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya 78 KK

#### 2. Sampel

Menurut **Sugiyono (2009:90)**, teknik pengabilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan sampel jenuh dimana penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 78 KK masyarakat yang ada di kampung Numbo berdasarkan karakteristik stasus sosial dalam masyarakat di Kampung Numbo agar dapat mengabarkan keadaan masyarakat Kampung Numbo seperti pada tabel berikut:

#### D. INSTRUMEN PENELITIAN

Istrumen penelitian ini adalah perangkat untuk mengali data primer dari responden sebagai sumber data terpenting dalam sebuah primer dari responden sebagai sumber data yang terpenting dalam sebuah data penelitian survey. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Skala Likert. Menurut **Sugiyono (2003:107)**, skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seorang atau kelompok orang tentang fenomena social dengan kategori sebagai berikut:

- |                |            |     |
|----------------|------------|-----|
| 1. Sangat Baik | Nilai Skor | = 4 |
| 2. Baik        | Nilai Skor | = 3 |
| 3. Cukup Baik  | Nilai Skor | = 2 |
| 4. Kurang Baik | Nilai Skor | = 1 |

#### E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi) ; **Soetrisno** dalam **Sugiyono (2006:166)** mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Atau dapat dikatakan bahwa pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat atau peristiwa, keadaan atau situasi sedang terjadi. Dalam observasi ini, penelitian terlibat dengan kegiatan –kegiatan sehari hari orang yang sedang diamati (responden), dengan kata lain penelitian dilakukan apa yang dilakukan jumlah KK masyarakat Kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya
2. Kuisisioner (*Quizisioner*) ; Menurut **Sugiyono (2006:1662)** Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi perangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk di jawab.
3. Penelitian Pustaka (*library research*); Penelitian pustaka yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui perpustakaan, baik merupakan buku-buku

literature, diktat-diktat, yang memuat keterangan tentang masalah yang dibuktikan dalam pembahasan ini.

## F. TEKNIK ANALISA DATA

Menurut Hasan(2006:24), analisis data adalah suatu proses dalam memperoleh ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus tertentu. Teknik analisis data deskriptif dapat menggunakan skor (skala ordinal), presentase (skala nominal), nilai rata-rata (mean), data yang sering muncul (modus), nilai tengah data (median) dan analisis data deskriptif lain yang memiliki sumber (refrensi) yang dapat dipercaya secara ilmiah.

Jumlah skor ideal (skor maksimum) : 4 x jumlah responden  
 : 4 x 78  
 : 312

Jumlah skor terendah ( skor minimum) : 1 x jumlah responden  
 : 1 x 78  
 : 78

Berdasarkan jumlah skor ideal (312) dan jumlah skor rendah (78) maka

Tabel Interpretasi skor sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tabel Interpretasi Skor

No	Interval jumlah Skor	Interpretasi
1	234 < Jumlah Skor ≤ 312	Sangat Baik
2	156 < Jumlah Skor ≤ 234	Baik
3	78 < Jumlah Skor ≤ 156	Cukup Baik
4	1 < Jumlah Skor ≤ 78	Kurang Baik

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Keadaan Lokasi Penelitian**

Kampung adalah merupakan suatu wilayah yang didiami oleh Sejumlah penduduk yang saling mengenal, mengargai satu sama lainnya Atas dasar hubungan kekerabatan dan yang kepentingan politik, ekonomi Sosial budaya serta, keamana yang dalam pertumbuhannya menjadi Kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat istiadat sehingga tercipta Ikatan lahir dan batin antara masing masing warganya, mata pencarian Warga hidup dari pertanian, perkebunan serta mempunyai hak mengatur Urusan rumah tangganya sendiri yang secara administratif berada di bawah Pemerintahan distrik serta pemerintahan kabupaten.

Nama kampung Numbo di peroleh dari sejarah masa lampau yang pernah Terjadi sebagai tempat para petani mengsunkan aktivitas pertaniandan perkebunan kemudian di jadikan sebagai nama kampung Numbo hingga sahat ini merupakan penduduk kampung yang dinamai oleh beberapa suku antara lain suku wanimbo dan suku jigibalom. Sebelum terbentuknya kampung harap terdahulu bermukim di Distrik Tiom Ollo Sejak tahun 1980 penduduk mulai bergabung dan mendirikan tempat Pemukimannya, pemukiman tersebut dibentuk oleh beberapa keluarga memang berasal dari suku lanny dan ada dari suku lembah

Terbentuk kampung Numbo yang merupakan pecahan dari kampung dari Kampung induk yaitu kelurahan bokon Kabupaten lanny jaya masyarakat/ Numbo adalah dari kampung kelurahan Bokon terdiri dari beberapa bagian yang bersama-sama memandang pentingnya pemakaran wilayah dusun untuk menjadi sebua kampung penduduk Numbo mengingat banyaknya yang kampung dengan membawah mesing-mesing maka perlu penyatuan dan persamaan yang berasal dari berbagai wilayah yang berbeda maka perlu di rumuskan sebua nama kampung yang di prakarsai oleh tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat maka di husulkan dusun menjadi pemakarang kampung Kelurahan Bokon\_nama kampung Numbo\_merupakan hasil musawarah masyarakat pada saat itu dan di sepakati

menjadi kampung Numbo . Nama kampung Numbo merupakan hasil musawara masyarakat pada saat itu dan disepakati menjadi kampung Numbo.

Dalam struktur organisasi pemerintahan pada tingkat kampung didasarkan pada peraturan pemerintah kampung undang- undang No 32 Thn 2004 tentang pemerintah daerah sebagai pengganti undang-undang No 22 Thn 1999. Selanjutnya peraturan pemerintah No 76 Thn 2001, tentang pendoman umum mengenai peraturan Kampung harus disesuaikan dengan undang – undang No 8 Thn 2005 tentang perubahan atas undang –undang No 32 Thn 2004.

Dari penjelasan diatas status Kampung Numbo menjadi kampung definitip hingga sekarang berdasarkan perda kabupaten Lanny Jaya No 8 Tahun 2014 tentang pembedakan kampung tahun 2014 sampai 2021 dan kepala kampungnya dapat memimpin sampai sekarang dengan nama kepala kampung ( Semi Wanimbo).

#### **a) Demografi**

##### **1. Keadaan penduduk**

Berdasarkan data yang penulis peroleh dilapangan bahwa penduduk kampung Numbo berjumlah KK 78, dengan perbandingan jumlah penduduk laki –laki sebanyak 60 jiwa, dan perempuan sebanyak 18 jiwa.

Adapun selengkapnya jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, usua /umum, agama,dan tingkat pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

##### **a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.**

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dikampung numbo distrik tiom Ollo Kabupaten Lanny Jaya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Pada Kampung Numbo Distrik  
Tiom Ollo Kabupaten Lanny Jya**

<b>No</b>	<b>Jenis kelamin</b>	<b>frekuensi</b>	<b>presentasi(%)</b>
	<b>Laki – laki</b>	<b>60</b>	<b>76,93</b>
	<b>Perempuan</b>	<b>18</b>	<b>23,07</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>78</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data : *Kantor Kampung Numbo Tahun 2021*

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas , terlihat Bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki – laki sebanyak 60 jiwa sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 18.

b. Jumlah penduduk berdasarakan usia / umum

Jumlah penduduk berdasarkan usia pada kampung Numbo Distrik Tiom Olo dapa dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Usia Pada Kampung Numbo**  
**Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya**

No	Usia	Jumlah Jiwa	Presentase
1	20-25	8	10,25
2	26- 30	25	35,89
3	31 -40	25	35,89
4	41 - 45	15	19,23
5	>50	5	6,41
<b>Total</b>		78	100;00

Sumber : Data Primer Kantor Kampung Numbo tahun 2021

Bersasarkan Tabel 4 : 2 Diatas terlihat bahwa sebagai penduduk kampung Numbo yang berusia 20-25 Thn berjumlah 8 jiwa (10,25 %), antara 26 – 30 Thn berjumlah 25 jiwa ( 35,89% ), antara 31– 40 Thn berjumlah 25 jiwa (35,89%), antara 41 – 45 Thn berjumlah 15 jiwa (19,23 % ) dan jiwa diatas 50 tahun berjumlah 5 jiwa (6,41 % ) dari data gambaran jumlah penduduk berdasarkan usia tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar penduduk yang berada di kampung Numbo dalam usia produktif.

c. Jumlah penduduk bersasarkan agama

Jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut pada kampung Numbo distrik Tiom Olo Kabpaten Lanny Jaya dapat dilihat pada tabel Berikut ini :

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama Pada Kampung Numbo**  
**Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jya**

No	Agama	Jumlah Jiwa	Presentase
1	Islam	-	-
2	Kristen protestan	78	100.00
3	Hindu		
4	Bunda		
Total		78	100.00

*Sumber Data: Kantor kampung Numbo tahun 2021*

Berdasarkan tabel 4:3 diatas, terlihat bahwa penduduk yang memeluk agama Islam tidak memeluk agama Kristen protestan 78 jiwa (100 % memeluk agama Hindu tidak ada memeluk agama bunda tidak ada

d. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di kampung numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.4**  
**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Pada Kampung**  
**Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya**

No	Pendidikan	Jumlah Jiwa	Presentase
1	Tidak sekolah	25	35,89 %
2	Sekolah dasar (SD)	20	25,64 %
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	11	14,10 %
4	Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan(SMA, SMK)	8	10,25 %
5	Diplomat 3 (D3)	3	3,84 %
6	Sarjana (S1)	11	14,10 %
Total		78	100.00

*Sumber Data : Kantor kampung Numbo Tahun 2021*

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, bahwa terlihat penduduk yang tidak sekolah berjumlah 25 jiwa (35,89%), yang pendidikan sekolah dasar (SD) berjumlah 20 jiwa (25,64%), yang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 11 jiwa (14,10 %), yang pendidikan sekolah Menengah Atas / Kejuruaan ( SMA. SMK ) berjumlah 8 jiwa (10,25%), yang pendidikan diplomat 3 (D3) Berjumlah 3 Jiwa (3,84%) yang pendidikan sarjana (S1) berjumlah 11 jiwa (14,10%).

## 2. Mata pencarian

Masyarakat dikampung Numbo distrik Tiom Olo pada umumnya hidup dengan mata pencarian utama pada sektor pertanian, perkebunan, berternak, dalam menunjang kehidupan keluarganya sektor pertanian dari sebagian besar penduduk kampung Numbo di lakukan dengan cara mengelolah lahan pertanian tradisionil. Lahan yang diolah dengan tanaman pokok adalah ubi jalar, keladi, dan sayur- sayur seperti kol, wortel, tomat, kacang panjang, sawi, buncis, dan lain – lain.

Sementara di sector lain perternakan, masyarakat pada umumnya berternak babi, sapi, kambing, seperti babi, hewan ini bernilai tinggi karena mempunyai makna dalam kegiatan adat ( Perkawinan, Kematiaan, Perceraian, perkara Pembunuhan dan bayar denda). Secara umum mata pencarian masyarakat di kampung numbo distri tiom olo dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.5**

### **Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencariaan**

#### **Di Kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya**

<b>No</b>	<b>Mata Pencariaan</b>	<b>Jumlah jiwa</b>	<b>Presentase</b>
1	Petani	30	38,46 %
2	Pendagag	10	12,82 %
3	Pegawai Negeri	13	16,66 %
4	Tidak Bekerja	25	35,89 %
Total		78	100.00

sumber data : Kantor Kampung Numbo Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4:5 Lihat diatas bahwa penduduk di kampung Numbo sebagai petani sebanyak 30 jiwa ( 38,46%) sebagai pendagag sebanyak 10 jiwa( 12,82%) sebagai pegawai Negeri 13 jiwa (16,66 %) dan yang tidak bekerja sebanyak 25 jiwa ( 35,89%)

## **b) Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi**

### **1. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi pemerintah kampung Numbo Distrik Tiom Olo mengacu pada peraturan Daerah kabupaten Lanny Jaya Nomor 9 Thn 2008, tentang susunan Organisasi Distrik dan Kampung/ kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya, maka dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Pemerintahan Kampung terdiri Atas
  - 1) Kepala Kampung
  - 2) Lembaga Musawarah Kampung (LMK)
- b. Perintahan Kampung Dalam Pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat kampung. Perangkat kampung terdiri atas:
  - 1) Sekretari Kampung
  - 2) Kepala Urusan Pemerintahan
  - 3) Kepala Urusan Kemasyarakatan
  - 4) Kepala Urusan Pembangunan
  - 5) Kepala urusan adminitrasi/ umum

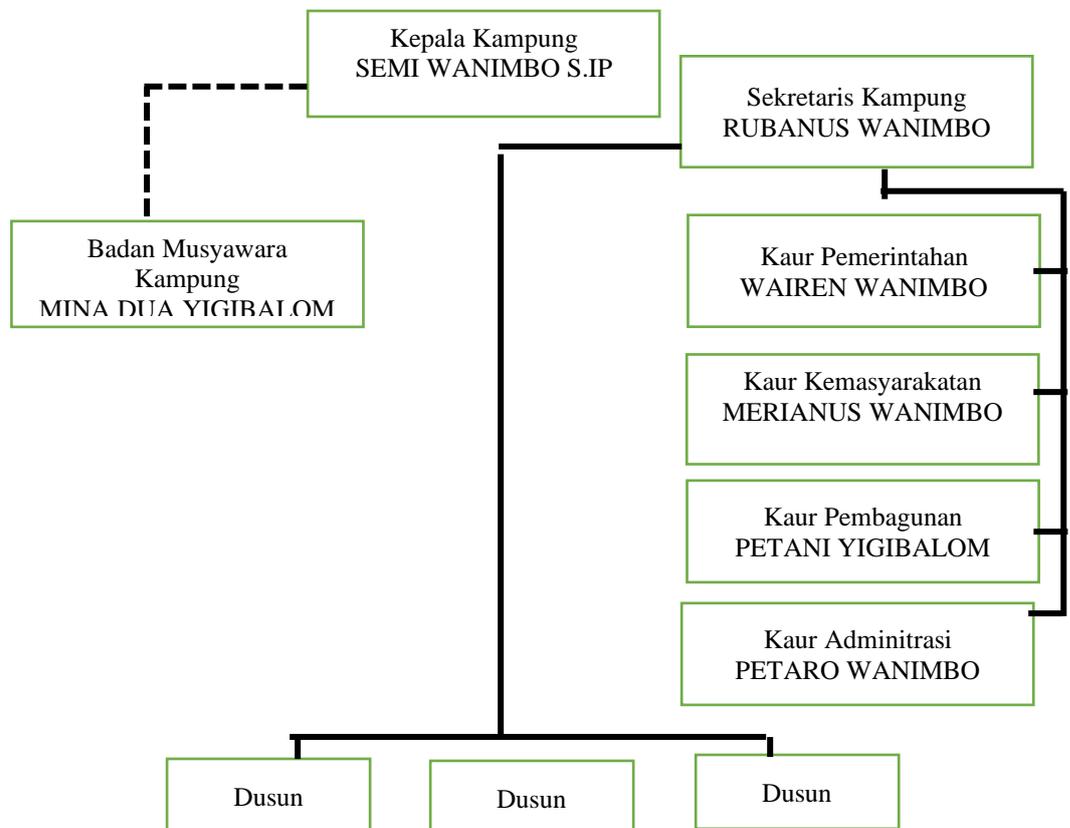
Dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksana tugas perlu ditata suatu organisasi yang baik pencapaian tugas pokok dalam suatu organisasi dapat dicapai.

Struktur organisasi perintahan pada tingkat dasar/ kampung didasarkan pada peraturan pemerinta Kampung, serta undang – undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang – undang No 22 Thn 1999. Selanjutnya peraturan pemerintah Nomor 76 Thn 2001, tentang pendoman umum mengenai peraturan kampung harus di sesuaikan denga Undang – undang

Nomor 8 Thn 2005, tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 32 tahun 2004.

Adapun Struktur Organisasi Pemerintahan Pada Kampung Numbo Distrik Tiom Olo dapat dilihat pada gamabar Berikut Ini:

**Gambar 4.1**  
**Gambar Struktur Organisasi Kampung Numbo Distrik Tiom Olo**  
**Kabupaten Lanny Jya**



Keterangan :

————— : Garis Komando

- - - - - : Garis Koordinasi

Berdasarkan gambar Diatas terlihat bahwa kampung numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya menganut pola setrealisasi dan disentralisasi dalam penyelegaraan pemerintahan hal ini terlihat dari urusan yang ditangani langsung oleh kepala urusan dibawah koordinasi serketaris kampung .

Untuk lebih jelasnya tentang tugas pokok dan fungsi wewenang sesuai dengan struktur organisasi diatas, berikut ini penjelasannya.

#### 1) Kepala Kampung

Kedudukan dan tugas pokok kepala kampung yaitu menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan penanggungjawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Membina penyelenggaraan pemerintahan kampung.
- b) Membina kehidupan masyarakat kampung.
- c) Membina perokonomiaan kampung.
- d) Memelihara ketentraman, ketertiban dan keyamanan masyarakat kampung
- e) Mengajukan rancangan peraturan kampung (RPK)bersama badan musyawara kampung (BMK) dan menetapkan sebagai peraturan kampung.
- f) Mendamaikan perselisihan masyarakat kampung.
- g) Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di kampung.

Sementara penanggungjawab seorang kepala kampung adalah sebagai berikut:

- a) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kepala kampung bertanggungjawab kepada masyarakat melalui badan musyawara kampung (BMK) dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada bupati melalui kepala distrik.
- b) Pertanggung jawaban dan laporan pelaksanaan kepala kampung disampaikan sekurang – kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
- c) Pertanggung jawaban kepala kampung yang ditolak oleh badan musyawara kampung (BMK) termasuk pertanggung jawaban keuangan, harus diperbaiki

dan dilengkapi dan disempurnakan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari setelah penolakan dan disampaikan kembali pada BMK.

## 2) Serketaris Kampung.

Serketaris Kampung adalah unsur staf yang membantu kepala kampung dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintahan kampung. Sekretaris kampung dipimpin oleh seorang serketaris; Serketaris kampung mempunyai tugas membantu kepala kampung dibidang pembinaan administrasi kepada seluruh perangkat pemerintahan kampung.

Serketaris kampung terdiri dari: Urusan pemerintahan, urusan pembangunan, urusan kesejahteraan, serta urusan umum. Masing – masing urusan dipimpin oleh seorang kepala urusan (KAUR)

Serketaris Kampung mempunyai Fungsi, tugas, dan wewenang sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan Koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat kampung.
- b) Pengumpulan bahan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelesaian tugas umum pemerintahan kampung, pembinaan masyarakat.
- c) Pelaksanaan – pelaksanaan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, perekonomian dan kesejahteraan.
- d) Pelaksanaan urusan keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh perangkat pemerintahan kampung.
- e) Penyusunan program kerja tahunan kampung.
- f) Penyusunan laporan pemerintahan kampung.

## 3) Urusan Pembangunan

Urusan pembangunan dalam membantu serketaris kampung mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Mengumpul, mengelolah dan mengevaluasi data serta laporan bidang ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, diantaranya: Bimbingan Koperasi, pengusaha golongan ekonomi lemah atau kegiatan

ekonomi lainnya, bimbingan keagamaan, olahraga, PKP,KB,dan kesehatan serta bimbingan kepada lembaga kemasyarakatan.

- b) Meningkatkan suwadaya dan partisipasi masyarakat.
- c) Membantu tugas social seperti: Palang merah Indonesia (PMI) dan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, jompo, dan jatim piatu dan sebagainya.
- d) Mempersiap kan daftar usulan rencana proyek/ usulan kegiatan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan /pemeliharaan prasarana fisik di kampung.
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepalah kampung.

#### 4) Urusan Perintahan

Urusan Pemerintahan dalam membantu serketaris kampung mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban serta menyusun laporan.
- b) Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilaya dan masyarakat.
- c) Melaksanakan dan memberikan pelayanan administrative terhadap masyarakat antara lai: Katru tanda penduduk (KTP), Pencacatan kegiatan lembaga masyarakatan, pelayan pencacatan sipil, pembukaan administrasi kampung.
- d) Pengawasan dan pembinaan kepada eks tahan politik (TAPOL).
- e) Membantu pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pengamanan bencana alam.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepla kampung.

#### 5) Urusan Umum

Urusan Umum adalah pelaksanaan kegiatan adminitrasi ada tingkat kampung dimana mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikt :

- a) Melaksanakan tugas kesekretariatan dan rumah tangga kampung.
- b) Membuat rencana penyusunan anggaran belanja pembangunan (ABP) kampung utuk di konsultasikan kepada badan musawarah kampung ( BMK).

- c) Penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas.
- d) Melaksanakan Tugas lain yang di berikan oleh kepala kampung.

#### 6) Kepala Dusun

Kepala Dusun (KADUS) merupakan unsur pelaksana tugas pada tingkat dusun, dimana tugas dan wewenangnya sebagai Berikut :

- a) Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- b) Melaksanakan kebijakan kepala kampung.
- c) Melaksanakan keputusan kepala kampung di wilayah kerjanya.
- d) Kepala dusun bertanggung jawab langsung kepada kepala kampung.

#### 7) Badan Musyawara kampung (BMK)

Badan musyawara kampung (BMK) adalah pelaksana legislatif di tingkat kampung, dimana tugas serta fungsi dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

- a) Mengayomi serta menjaga kelestarian adat istiadat yang masi berkembang di kampung.
- b) Legistasi serta merumuskan dan menetapkan peraturan kampung.
- c) Bersama kepala kampung membentuk keputsan kampung.
- d) Bersama kepala kampung menetapkan anggaran pendapatan dan belanja kampung.
- e) Menampung aspirasi dari masyarakat dan mengatur aspirasi tersebut dilanjutkan penjabat instansi yang berwenag.
- f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah kampung.

Berdasarkan uraian tugas pokok fungsi dan wewenag maka aparat pemerintahan dikampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten lanny Jaya yang dimulai dari kepala kampung, serketaris kampung, kepala – kepala urusan dan kepala dusun serta anggota badan musyawara kampung (BMK).

## 2. Keadaan Responden

Dalam suatu organisasi harus didukung oleh faktor sumber daya manusia dalam rangka menggerakkan dan menjalankan aktifitas guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Berikut ini dapat dijelaskan keadaan responden pemerintahan di kantor kampung numbo distrik tiom ollo kabupaten lanny jaya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

### a) Keadaan Responden

**Tabel 4.6**

**Nama Responden Kampung, Tingkat Pendidikan Dan Jabatan  
Di Kampung Numbo Distrik Tiom Ollo Kabupaten Lanny Jaya**

No	Nama	Pendidikan	Jabatan
1	Semi Wanimbo	S1	Kepala kampung
2	Urubanus Wanimbo	SMA/ SLTA	Serketaris Kampung
3	Wairen Wanimbo	SMP	Kaur Pemerintahan
4	Petani Yigibalom	SMP	Kaur Pembangunan
5	Merianus Wanimbo	SMA/ SLTA	Kaur Kemasyarakatan
6	Petaro Wanimbo	S1	Kaur Adminitrasi

Sumber Data : Responden kampung Numbo menurut umur, jenis kelamin dan agama.

**Tabel 4.7**

**Keadaan Responden Berdasarkan Umur  
Di Kampung Numbo Distrik Tiom Ollo Kabupaten Lanny Jaya**

No	Umur (Thn)	Jumlah (orang)	Persentase(%)
1	20-25	8	10,25 %
2	26-30	25	35,89 %
3	31-40	25	35,89 %
4	41-45	15	19,23 %
5	>50	5	6,41 %
<b>Total</b>		<b>78</b>	<b>100.00</b>

*Sumber Data : Kantor kampung Numbo Tahun 2021*

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa responden yang umurnya kurang dari 20-25 tahun sebanyak orang 8 (10,25%), yang berumur 26-30 tahun sebanyak 25 orang (35,89%), yang berumur 31-40 tahun sebanyak 25 orang (35,89%), yang berumur 41-45 tahun sebanyak 15 orang (19,23%), sedangkan umurnya diatas 50 thn sebanyak 5 orang (6,41 %).

Keadaan responden berdasarkan jenis kelamin di kampung Numbo distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya berikut ini :

**Tabel 4.8**  
**Keadaan Responden berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Di Kampung Numbo Distrik Tiom Olo**  
**Kabupaten Lanny Jaya**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	Laki – laki	60	76,92%
2	Perempuan	18	23,07 %
	Total	78	100.00

*Sumber data : Kantor kampung Numbo tahun 2021*

Berdasarkan tabel diatas bahwa Responden kampung Numbo yang berjenis kelamin laki – laki sebanyak 60 orang (76,92%), sedangkan perempuan sebanyak 18 orang (23,07 %).

Keadaan responden berdasarkan pemeluk agama di kampung numbo distrik tiom olo kabupaten Lanny Jaya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.9**  
**Keadaan Responden berdasarkan Pemeluk Agama**  
**Di Kampung Numbo Distrik Tiom Ollom**  
**Kabupaten Lanny Jaya**

No	Agama	Jumlah (Orang)	Presentase
1	Islam		-
2	Kristen .Prosestan	78	100
3	Kristen Katolik	-	-
4	Bundha	-	-
5	Hindu	-	-
Total		78	100.00

*Sember data : Kampung Numbo Tahun 2021*

Berdasarkan tabel diatas bahwa responden kampung Numbo yang beragama Kristen Prostestan Baptis sebanyak 78 Orang (100%),

b) Sarana dan Prasarana

Berbicara masala kinerja responden, maka perlu ditinjau dengan sarana dan prasarana agar dalam melayani masyarakat lancar, yang dimaksud sarana dan prasarana di sini adalah semua barang – barang yang dipakai / diperlukan baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan dipaki habis:

a. Barang bergerak dapat di bedakan dalam pengertian, yaitu :

- 1) Barang habis pakai, yaitu barang barang yang dapat susut volumenya pada waktu dipakai dan dalam jangka waktu tertentu barang tersebutsusut sampai habis atau tidak di fungsikan langi.
  - 2) Barang tidak habis pakai, yaitu barang – barang yang ulang kali jangka waktu yang cukup lamah dan memerlukan perawatan agar selalu tetap dalam keadaan baik.
- b. Barang tidak bergerak yairu barang yang tidak berpindah –pindah , seperti tanah dan bangunan untuk lehbih jelasnya barang sarana dan prasarana untuk menunjang tugas / kegiatan di kantor kampung Numbo Distrik Tiom Ollo Kabupaten Lanny Jaya dalam tabel sebagai berikut ini?

**Tabel 4.10**  
**Keadaan Inventaris Kantor Di Kampung Numbo**  
**Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya**

No	Nama barang	Satuan	jumlah	Keterangan
1	Tanah	0.01 KM <sup>2</sup>	1	Baik
2	Bangunan kantor	1	1	Baik
3	Meja	2	2	Baik
4	Kursi	1	1	Baik
5	Bangku panjang	2	2	Baik
6	Mesin Ketik	-	-	
7	Kendaraan Roda 2	1	1	Baik
8	Kendaraan Roda 4	-	-	
Total		7	7	Baik

*sumber data : Kanto kampung Numbo tahun 2021*

### 3. Analisis Data

Untuk mendapatkan jawaban hasil penelitian maka pengolahan data ini dalam bentuk analisis skor dan kemudian diberikan predikat jawaban yang akan di interpertasikan kedalam bentuk kalimat, hasil penelitian pengolahan dana kampung tahun 2020-2021 di kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya :

#### 1) Pengelolaan data kampung

Untuk menganalisis indikator lingkungan kerja hasil kuisisioner dari penelitian sebagai berikut:

##### a) Indikator Akuntabilitas Perencanaan

1. Pemerintah Kampung Mewujudkan prinsip transparansi, dalam proses Penggunaan Alokasi Dana Kampung

**Tabel 4.11**  
**Tanggapan Responden Berkaitan Dengan Anggaran Dana**  
**Kampung Mewujudkan prinsip transparansi, dalam proses**  
**Pengunaan Alokasi Dana Kampung**

No	Kategori Jadwal	Skor	frengkuensi	Nilai Skor
1	Sangat Baik	4	42	168
2	Baik	3	20	60
3	Cukup Baik	2	16	32
4	Kurang Baik	1	0	0
Jumlah		10	78	260

*Sumber : Olahan data Kuesioner kantor kampung Numbo tahun 2021*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melibatkan 78 orang sebagai responden pada kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya anggaran dana kampung Mewujudkan prinsip transparansi, dalam proses Pengunaan Alokasi Dana Kampung dengan jumlah skor sebesar 260 berada pada **pradikat sangat Baik**. Hasil ini dapat dilihat dari bagaimana keterlibatan masyarakat dalam merencanakan kegiatan berdasarkan Indikator perencanaan.

2. Penggalokasian Anggaran dana kampung masyarakat berpartisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana kampung

**Tabel 4.12**  
**Tanggapan Responden Berkaitan Degan Pengalokasian Anggaran**  
**Alokasi Dana Kampung masyarakat Berpartisipasi Dalama Proses**  
**Perencanaan Pemerintah Kampung**

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1	Sangat Baik	4	37	148
2	Baik	3	26	78
3	Cukup Baik	2	15	30
4	Kurang Baik	1	0	0
Jumlah			78	256

*Sumber : Olan data Kuesioner kantor kampung Numbo Tahun2021*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melibatkan 78 orang sebagai responden pada kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya berkaitan dengan pengalokasian anggaran dana kampung masyarakat berpartisipasi dalam proses perencanaan pemerintah kampung dengan jumlah skor sebesar 256 berada pada predikat **sangat baik**. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana keterlibatan–keterlibatan masyarakat dalam merencanakan kegiatan berdasarkan Indikator perencanaan.

3. Pemerintahan kampung dan masyarakat hadir dalam musyawarah kampung dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana kampung

**Tabel 4.13**

**Tanggapan Responden berkaitan Dengan Anggaran Kampung  
Pemerintah Kampung dan Masyarakat Hadir dalam musyawara  
kampung dalam rangka perencanaan.**

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1	Sangat Baik	4	37	148
2	Baik	3	28	48
3	Cukup Baik	2	13	26
4	Kurang Baik	1	0	0
Jumlah		10	78	222

*Sumber : Olan data Kuesioner Kantor kampung Numbo, 2021*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melibatkan 78 orang sebagai Responden pada kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya, pemerintah kampung dan masyarakat hadir dalam musyawara kampung dalam rangka perencanaan kampung dengan jumlah skor sebesar 222 berada pada predikat **baik**. Hasil ini dapat dilihat dari sebagaimana keterlibatan masyarakat dalam merencanakan kegiatan berdasarkan indikator perencanaan.

**b) Indikator Akuntabilitas Pelaksanaan**

1. Anggaran dana kampung berperan dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan program alokasi dana kampung

**Tabel 4.14**

**Tanggapan Responden Berkaitan Dengan Anggaran Dana Kampung Dalam Mendukung Keterbukaan Dan Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Alokasi Dana Kampung**

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1	Sangat Baik	4	25	100
2	Baik	3	32	96
3	Cukup Baik	2	21	42
4	Kurang Baik	1	0	0
Jumlah		10	78	238

*Sumber : Olahan data kuesioner kantor kampung Numbo Tahun 2021*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melibatkan 78 orang sebagai responden pada kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya Kampung dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan program alokasi dana kampung dengan jumlah skor sebesar 238 berada pada predikat **sangat Baik**. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana keterlibatan Masyarakat dalam pengelolaan dan akampung berdasarkan indikator Pelaksanaan.

2. Pemerintahan kampung melaksanakan program kerja melalui pelaksanaan alokasi dana kampung

**Tabel 4.15**

**Tanggapan Responden Berkaitan Dengan Perintahan Kampung Melaksanakan Program Kerja Melalui Pelaksanaan Alokasi Anggaran Dana Kampung**

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1	Sangat Baik	4	24	96
2	Baik	3	37	111
3	Cukup Baik	2	17	34
4	Kurang Baik	1	78	0
Jumlah		10	78	241

*Sumber : Olahan data kuesioner kantor kampung Numbo Tahun 2021*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melibatkan 78 orang sebagai responden pada kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya, pemerintahan kampung melaksanakan program kerja melalui pelaksanaan alokasi anggaran dana kampung dengan jumlah skor sebesar 241 berada pada predikar **Sangat Baik**. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan dana kampung berdasarkan indikator pelaksanaan.

3. Pemerintahan Kampung dan masyarakat Kampung harus keterbukaan dalam proses pelaksanaan Alokasi dana Kampung

**Tabel 4.16**

**Tanggapan Responden Berkaitan Dengan Pemerintahan Kampung Dengan Masyarakat Kampung Harus Keterbukaan Dalam Proses Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung**

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1	Sangat Baik	4	26	104
2	Baik	3	33	99
3	Cukup Baik	2	19	38
4	Kurang Baik	1	0	0
Jumlah		10	78	241

*Sumber : Olahan data kuesioner kantor kampung Numbo Tahun 2021*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melibatkan 78 orang sebagai responden pada kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya berkaitan dengan pemerintahan kampung dengan masyarakat kampung harus keterbukaan dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana kampung dengan jumlah skor sebesar 241 berada pada predikat **Sangat Baik**. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan dana kampung berdasarkan indikator pelaksanaan.

**c) Indikator Akuntabilitas pengawasan**

1. Pemerintah Kampung dapat proses monitoring pelaksanaan dana kampung.

**Tabel 4.17**

**Tanggapan Responden Berkaitan Dengan Pemerintahan Kampung  
Dapat Proses Monitoring Pelaksanaan Dana Kampung.**

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1	Sangat Baik	4	24	96
2	Baik	3	26	78
3	Cukup Baik	2	28	56
4	Kurang Baik	1	0	0
Jumlah		10	78	230

Sumber : *Olahan data kuesioner kantor kampung Numbo Tahun 2021*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melibatkan 78 orang sebagai responden pada kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya berkaitan dengan pemerintahan kampung dapat proses monitoring pelaksanaan dana kampung dengan jumlah skor 230 berada pada predikat **Baik**. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana keterlibatan Masyarakat dalam memPertanggung jawaban dana kampung berdasarkan indikator Akuntabilitas Pengawasan

2. Pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan mudah di pahami oleh masyarakat

**Tabel 4.18**  
**Tanggapan Responden Berkaitan Dengan Pengawasan Dalam**  
**Pelaksanaan Pelayanan Dapat Mudah Dipahami Oleh Masyarakat**

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1	Sangat Baik	4	25	100
2	Baik	3	22	66
3	Cukup Baik	2	31	62
4	Kurang Baik	1	0	0
Jumlah		10	78	228

*Sumber : Olahan data kuesioner kantor kampung Numbo Tahun 2021*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melibatkan 78 orang sebagai responden pada kampung Numbo Distrik Tiom Ollo Kabupaten Lanny Jaya berkaitan dengan Dengan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan dapat mudah dipahami oleh masyarakat dengan jumlah skor 228 berada pada predikat **Baik**. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana keterlibatan Masyarakat dalam memPertanggung jawaban dana kampung berdasarkan indikator akuntabilitas Pengawasan.

3. Pemerintah kampung dan masyarakat ikut mengawasi / memonitor laporan kegiatan alokasi dana Kampung

**Tabel 4.19**  
**Tanggapan Responden Berkaitan Dengan Pemerintah Kampung**  
**Dan Masyarakat Ikut Mengawasi / Memonitor Laporan Kegiatan**  
**Alokasi Dana Kampung**

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1	Sangat Baik	4	28	112
2	Baik	3	18	54
3	Cukup Baik	2	32	64
4	Kurang Baik	1	0	0
Jumlah		10	78	230

*Sumber : Olahan data Kuesioner kantor kampung Numbo Tahun 2021*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melibatkan 78 orang sebagai responden pada kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya berkaitan dengan Pemerintah Kampung Dan Masyarakat Ikut Mengawasi / Memonitor Laporan Kegiatan Alokasi Dana Kampung dengan jumlah skor 230 berada pada predikat **Baik**. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana keterlibatan Masyarakat dalam memPertanggung jawaban dana kampung berdasarkan indikator Akuntabilitas Pengawasan.

**d) Indikator Akuntabilitas Pertanggung jawab**

1. Dalam pembangunan dana kampung pemerintah kampung bertanggung jawab

**Tabel 4.20**

**Tanggapan Responden Berkaitan Dengan dalam pembangunan dana kampung pemerintah kampung bertanggung jawab.**

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1	Sangat Baik	4	34	136
2	Baik	3	24	69
3	Cukup Baik	2	21	42
4	Kurang Baik	1	0	0
Jumlah		10	78	247

*Sumber : Olahan data Kuesioner kantor kampung Numbo Tahun 2021*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melibatkan 78 orang sebagai responden pada kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya berkaitan dengan dalam pembangunan dana kampung pemerintah kampung bertanggung jawab dengan jumlah skor 247 berada pada predikat **Sangat Baik**. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana keterlibatan Masyarakat dalam memPertanggung jawaban dana kampung berdasarkan indikator Pertanggung jawaban.

2. Program kerja melalui dana kampung bertanggung jawab oleh pemerintah kampung

**Tabel 4.21**

**Tanggapan Responden Berkaitan Dengan program kerja melalui dana  
kampung Bertanggung jawab oleh Pemerintah kampung.**

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1	Sangat Baik	4	29	116
2	Baik	3	27	81
3	Cukup Baik	2	22	44
4	Kurang Baik	1	0	0
Jumlah		10	78	241

*Sumber : Olahan data Kuesioner kantor kampung Numbo Tahun 2021*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melibatkan 78 orang sebagai responden pada kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya berkaitan dengan program kerja melalui dana kampung Bertanggung jawab oleh Pemerintah kampung dengan jumlah skor 241 berada pada predikat **Sangat Baik**. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana keterlibatan Masyarakat dalam memPertanggung jawaban dana kampung berdasarkan indikator Pertanggung jawaban.

3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang – undangan.

**Tabel 4.22**

**Tanggapan Responden Berkaitan Dengan melaksanakan tugas dan  
tanggung jawab sesuai dengan perundang – undangan**

No	Kategori Jawaban	Skor	Frekuensi	Nilai Skor
1	Sangat Baik	4	26	104
2	Baik	3	33	99
3	Cukup Baik	2	19	38
4	Kurang Baik	1	0	0
Jumlah		10	78	241

*Sumber : Olahan data Kuesioner kantor kampung Numbo Tahun 2021*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melibatkan 78 orang sebagai responden pada kampung Numbo Distrik Tiom Olo

Kabupaten Lanny Jaya berkaitan dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan perundang – undangan dengan jumlah skor 241 berada pada predikat **Sangat Baik**. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana keterlibatan Masyarakat dalam memPertanggung jawaban dana kampung berdasarkan indikator Pertanggung jawaban.

## B. Pembahasan

Untuk menunjukkan data dan hasil penulisan ini maka penulis melakukan interpretasi data secara keseluruhan untuk mengetahui bagaimana mengetahui pengelolaan dana kampung 2020-2022 di kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya.

Dalam mengenalisa variabel pengelolaan dana kampung dengan indikator pencairan, pengelolaan dan pertanggung jawaban . Sesuai hasil penelitian yang diperoleh dari daftar pertanyaan yang disebarkan untuk diisi oleh responden maka data yang diperoleh yang berkaitan dengan indikator pada variabel pengelolaan dana kampung dengan indikator pencairan, pengelolaan dan pertanggung jawaban yang dijelaskan Per sub indikator seperti berikut ini.

### 1. Indikator Akuntabilitas Perencanaan

**Tabel 4.23**

#### **Rata – Rata Persentase Indikator Perencanaan**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Nilai Skor</b>	<b>Predikat</b>
1	Pemerintah Kampung mewujudkan prinsip transparansi, dalam proses Penggunaan Alokasi Dana Kampung	260	Sangat Baik
2	Masyarakat berpartisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana Kampung	256	Sangat Baik
3	Pemerintah Kampung dan masyarakat hadir dalam musyawarah Kampung dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana Kampung	222	Baik
Jumlah Rata-rata		246	Baik

*Sumber : Olahan data Kuesioner kantor kampung Numbo Tahun 2021*

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran daftar pertanyaan kepada masyarakat Kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya Anggaran dana kampung mewujudkan prinsip transparansi, dalam proses Penggunaan Alokasi Dana Kampung dengan predikat 260, Masyarakat berpartisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana Kampung dengan predikat 256, Pemerintah Kampung dan masyarakat hadir dalam musyawarah Kampung dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana Kampung dengan Predikat 222, Maka angka- angka pada pembahasan tersebut menunjukkan bahwa penggelolahan dana kampung tahun 2020-2021 Di Kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya mendapatkan nilai skor 246 Kategori Baik.

## 2. Indikator Akuntabilitas Pelaksanaan

**Tabel 4.24**

**Rata – Rata Persentase Indikator Akuntabilitas Pelaksanaan .**

No	Uraian	Nilai Skor	Predikat
1	Pemerintah Kampung berperan dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan program alokasi dana Kampung	238	Sangat Baik
2	Perintahan kampung melasnakan program kerja melalui pelaksanaan alokasi dana kampung	241	Sangat Baik
3	Pemerintah Kampung dan masyarakat kampung harus keterbukaan dalam proses pelaksanaan alokasi dana kampung	241	Sangat Baik
	Jumlah Rata-Rata	240	Sangat Baik

*Sumber : Olahan data Kuesioner kantor kampung Numbo Tahun 2021*

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran daftar pertanyaan kepada masyarakat Kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya, Pemerintah Kampung berperan dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan program alokasi

dana Kampung dengan Predikat 238, Perintahan kampung melasnakan program kerja melalui pelaksanaan alokasi dana kampung dengan predikat 241, Pemerintah Kampung dan masyarakat kampung harus keterbukaan dalam proses pelaksanaan alokasi dana kampung dengan Predikat 241, Maka angka- angka pada pembahasan tersebut menunjukkan bahwa penggelolahan dana kampung tahun 2020-2021 Di Kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya mendapatkan nilai skor 240 Kategori Baik.

### 3. Indikator Akuntablitas pengawasan

**Tabel 4.25**

**Rata – Rata Persentase Indikator Akuntablitas Pengawasan .**

No	Uraian	Nilai Skor	Predikat
1	Pemerintah Kampung dapat Proses monitoring pelaksanaan dana kampung	230	Baik
2	Pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan mudah dipahami oleh masyarakat	228	Baik
3	Pemerintah Kampung dan Masyarakat ikut mengawasi/memonitor pelaporan kegiatan alokasi dana Kampung	230	Baik
	Jumlah Rata-Rata	229,3	Baik

*Sumber : Olahan data Kuesioner kantor kampung Numbo Tahun 2021*

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran daftar pertanyaan kepada masyarakat Kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya, Pemerintah Kampung dapat Proses monitoring pelaksanaan dana kampung dengan Predikat 230, Pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan mudah dipahami oleh masyarakat 228, Pemerintah Kampung dan Masyarakat ikut mengawasi/memonitor pelaporan kegiatan alokasi dana Kampung dengan Predikat 230, Maka angka- angka pada pembahasan tersebut menunjukkan bahwa penggelolahan dana kampung tahun 2020-2021 Di Kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya mendapatkan nilai skor 229,3 Kategori Baik.

#### 4. Indikator Pertanggung Jawaban

**Tabel 4.26**

**Rata – Rata Persentase Indikator Pertanggung Jawaban.**

No	Uraian	Nilai Skor	Predikat
1	Dalam penggunaan dana kampung, pemerinta kampung bertanggung jawab	247	Sangat Baik
2	Program kerja melalui dana kampung bertanggung jawab oleh pemerintah kampung	241	Sangat Baik
3	Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang - undangan	246	Sangat Baik
	Jumlah Rata-Rata	244'6	Sangat Baik

*Sumber : Olahan data Kuesioner kantor kampung Numbo Tahun 2021*

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran daftar pertanyaan kepada masyarakat Kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya Anggaran dana kampung Dalam penggunaan dana kampung, pemerinta kampung bertanggung jawab dengan Predikat 241 Program kerja melalui dana kampung bertanggung jawab oleh pemerintah kampung dengan predikat 241, Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang - undangan dengan Predikat 246, Maka angka- angka pada pembahasan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana kampung tahun 2020-2021 Di Kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya mendapatkan nilai skor 244,6 Kategori Baik.

#### a) Rekapitulasi indikator – Indikator Pada Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung.

Untuk mengetahui pengelolaan dana kampung tahun 2020-2021 di Kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten lanny Jaya dapat dilihat dalam tabel di bahwa ini

**Tabel 4.27**  
**Rata – Rata Persentase Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana**  
**Kampung.**

No	Uraian	Nilai Skor	Predikat
1	Indikator Akuntabilitas Perencanaan	246	Baik
2	Indikator Akuntabilitas Pelaksanaan	240	Baik
3	Indikator Akuntabilitas pengawasan	229,3	Baik
4	Indikator Akuntabilitas Pertanggung Jawaban	244,6	
Jumlah Rata-Rata		239,9	Baik

*Sumber : Olahan data Kuesioner kantor kampung Numbo Tahun 2021*

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran daftar pertanyaan kepada masyarakat Kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya dari data tabel 4.28 diuraikan beberapa indikator Akuntabilitas Perencanaan dengan predikat 246, Dan Indikator akuntabilitas pelaksanaan dengan predikat 240, dan indikator Akuntabilitas pengawasan dengan predikat 229,3 dan indikator Akuntabilitas pertanggung Jawaban dengan predikat 224,6, maka rekapitulasi Rata- rata Persentase variabel Akuntabilitas pengelolaan dan kampung tahun 2020-2021 Di Kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya mendapatkan nilai skor 239,9 Dengan predikat Baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran daftar pernyataan kepada Masyarakat Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jayadari data di uraikan beberapa Indikator Akuntabilitas Pencanaan dengan Predikat 246, Indikator Akuntabilitas pelaksanaan dengan Predikat 240, Indikator Akuntabilitas Pengawasan dengan Predikat 229,3, dan Indikator Akuntabilitas Pertanggung jawaban dengan predikat 443,6 maka rekapitulasi rata – rata presentase variabel pengelolah dana kampung tahun 2020-2021 di kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya diatas mendapatkan nilai skor 239,9 denga fredikat Baik.

#### **B. Saran – saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas berikut ini akan di berikan saran yakni

1. Perlu koordinasi antara aparaturn kampung dengan masyarakat dalam pengelolaan dana kampung dan evaluasi sesuai dengan inplementasi dari dana tersebut
2. Perlu ada keterlibatan masyarakat dalam pertanggung jawaban dana kampung
3. Hilangkan kebiasaan – kebiasaan yang sering terbawa dalam pengelolaan dana kampung di kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya
4. Perlunya pemberiaan motivasi kepada dari masyarakat agar bisa terlibat sama – sama dalam pengelolaan dana kampung.

Pengambilan data Penduduk dengan kepala kampung numbo



Pembagian bama kepada masyarakat di kampung numbo distrik tiom ollo kabupaten lanny jaya



Pengambilan data penduduk dengan masyarakat kampung numbo distrik tiom ollo  
Kab lanny jaya



## INSTRUMEN PENELITIAN

### A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : .....

Jenis Kelamin :         Laki-laki                 Perempuan

Umur : .....

Pendidikan : .....

Agama : .....

Status Perkawinan : .....

### B. PENTUNJUK KEGIATAN

Bapak/Ibu cukup memberikan tanda *check list* (√) pada pilihan jawaban yang tersedia pada tabel sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu. Setiap pernyataan mengharapakan hanya satu jawaban dengan memilih:

NO	Pertanyaan		Skor
1.	SB	: Sangat Baik	4
2.	B	: Baik	3
3.	CB	: Cukup Baik	2
4.	KB	: Kurang Baik	1

### C. DAFTAR PERTANYAAN

Pertanyaan-pertanyaan berikut berkaitan dengan analisi akuntabilitas pengelolaan dana kampung (Studi Kasus Kampung Numbo Distrik Tiom Olo Kabupaten Lanny Jaya)

#### 1. Akuntabilitas Perencanaan

No	Pertanyaan	SB	B	CB
1	Pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi, dalam proses Penggunaan Alokasi Dana Kampung			
2.	Masyarakat berpartisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana Kampung			
3.	Pemerintah desa dan masyarakat hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana Kampung			